

UPAYA GREENPEACE DALAM MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DI PULAU KALIMANTAN

Oleh: Muhamad Amirudin

Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The purpose of this research was to analyze Greenpeace's approaches and efforts in preventing forest fires that occur in Kalimantan. Greenpeace serves as one of the environmental non-governmental organizations in Indonesia.

This study is a qualitative research that uses the theory of NGO roles to examine the efforts made by Greenpeace in preventing forest fires in Kalimantan. In this research, the analysis level used is group analysis. Data collection was carried out using document analysis methods sourced from several books, journal articles, and other references relevant to the efforts made by Greenpeace in preventing forest fires on the island of Kalimantan.

The research show that Greenpeace, as one of the NGOs focusing on environmental issues in Indonesia, has taken several measures to prevent forest fires in Indonesia. Greenpeace fulfills its role as an NGO through various means, such as providing assistance services and technical expertise, directly participating in operational activities, conducting analyses related to environmental issues, campaigning to raise public awareness and encourage action on various environmental issues, and facilitating negotiations between civil society and the government.

Keywords: Greenpeace, Forest Fires, Kalimantan Island, International NGO

PENDAHULUAN

Terlaksananya *United Nations Conference on Human Environment* tahun 1972 di Stockholm menjadikan isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional. Konferensi tersebut mengupayakan agar masyarakat dunia memiliki rasa keprihatinan terhadap lingkungan yang ditempatinya dengan cara menjaga kestabilan lingkungan hidup yaitu tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan agar kebutuhan di masa kini dan masa yang akan datang tercukupi.

Hutan Indonesia merupakan hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Indonesia juga ditempatkan dalam peringkat kedua setelah Brazil dalam hal keanekaragaman hayati dengan luas daratan sebesar 1.860.359,67 KM², wilayah perairan seluas 5,8 juta KM², serta 81.000 KM garis pantai. Keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia terdiri dari 10 persen spesies tanaman berbunga, 12 persen spesies mamalia, 16 persen spesies reptil dan amfibi, 17 persen spesies burung, dan 25 persen spesies ikan yang terdapat di dunia.¹

Angka deforestasi di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan fluktuasi. Deforestasi menurun secara signifikan dari tahun 2016 hingga 2018, namun kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019. Walaupun ada penurunan pada beberapa tahun, total deforestasi dalam periode empat tahun tersebut tetap cukup besar, mencapai 2.000.202,8 hektar. Ini menunjukkan bahwa deforestasi masih menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan yang lebih

efektif dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan.²

Isu ini pun menjadi perhatian bagi *International Non Governmental Organization* (NGO) yang berfokus pada isu lingkungan. Greenpeace merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah terbesar yang berkampanye untuk permasalahan lingkungan hidup dalam skala global. Hingga saat ini, Greenpeace selalu melakukan kampanye mengenai perlindungan hutan dari aktivitas yang menimbulkan deforestasi atau yang dikenal juga dengan istilah *zero deforestation*. Greenpeace berdiri pada tahun 1971 yang awal pendiriannya bertujuan untuk menghentikan uji coba bom nuklir oleh pemerintah Amerika Serikat di Amchitka, Alaska. Selain menghentikan uji coba bom nuklir, saat ini Greenpeace juga bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, mencegah polusi dan penyalahgunaan lingkungan, serta mempromosikan kedamaian dan pelucutan senjata. Hingga saat ini, Greenpeace telah hadir di 55 negara di Eropa, Amerika, Asia, Afrika dan Pasifik. Kantor pusat dari Greenpeace sendiri berlokasi di Amsterdam, Belanda.³

Perkiraan Greenpeace, 76%-80% deforestasi ini dipercepat oleh tingginya angka pembalakan liar, penebangan legal, dan kebakaran hutan. Dalam data yang dimiliki oleh Greenpeace disebutkan bahwa dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90% hutan dunia, negara yang meraih tingkat laju.⁴

¹ Wirendro Sumargo, "*Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000 – 2009*", (Forest Watch Indonesia, 2011). Hal. 1.

² Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/> (diakses pada 10 November 2022)

³ Greenpeace International, "Our Offices". <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/worldwide/> (Diakses pada 26 Agustus 2022)

⁴ Bella Putri, "*Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan*

Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara yang ada di Pulau Kalimantan mulai berupaya untuk menyelamatkan hutan mereka. Selain Amazon, Pulau Kalimantan merupakan salah satu hujan tropis dunia yang sangat penting dan dikenal dengan nama *Heart of Borneo* (HoB), dan menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 12 juta penduduk lokal dan asli Pulau Kalimantan. Berdasarkan data dari *Heart of Borneo Strategic Plan*, diperkirakan 40-50% dari tanaman dan hewan di dunia merupakan tanaman endemik Pulau Kalimantan. Tumbuhnya kepedulian bersama terkait dengan penurunan kualitas lingkungan dan tingkat tutupan hutan di Kalimantan.⁵ Hal ini dibuktikan dengan menurunnya produktivitas hutan, potensi hilangnya keanekaragaman hayati, dan tentu saja kesatuan fragmentasi hutan yang saling terkoneksi. Pengelolaan yang kurang bijaksana dalam pengambilan kayu, serta tingginya alih fungsi hutan menjadi penyebab utama tingginya penurunan kualitas lingkungan di Kalimantan.

Kerangka Dasar Teori Perspektif: Pluralisme

Hubungan internasional telah mengalami perkembangan pesat, mencakup berbagai aspek kehidupan. Pada awalnya, hubungan internasional terbatas pada interaksi antara negara yang melintasi batas-batas negara. Namun, seiring waktu, hubungan internasional tidak lagi hanya didominasi oleh negara sebagai aktor utama.

Menurut perspektif pluralisme yang dijelaskan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, terdapat empat asumsi dasar dalam menganalisis hubungan internasional. Pertama, aktor non-negara, seperti organisasi internasional, memiliki peran penting dalam politik global. Kedua, negara bukan lagi satu-satunya aktor utama, karena aktor lain juga memiliki peran signifikan. Ketiga, negara tidak selalu bertindak rasional, karena kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor domestik. Keempat, isu-isu yang dihadapi tidak hanya terkait kekuasaan atau keamanan nasional, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, Greenpeace dianggap sebagai aktor non-negara yang memainkan peran penting dalam politik global, terutama dalam pemantauan dan advokasi isu lingkungan.⁶

Tingkat Analisis: Kelompok

Level Analisis sendiri menurut David Singer adalah target analisis dimana peneliti dapat memperoleh gambaran, penjelasan, dan perkiraan yang akurat tentang perilaku aktor-aktor hubungan internasional.⁷ Tingkat analisis ini diasumsikan bahwa yang menjadi fokus utama adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok dan organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional.⁸ Penelitian ini akan difokuskan kepada

Lahan di Indonesia", (JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni, 2019), Hal. 9.

⁵ Suni, Bakran, and Haunan Fachry Rohilie. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Heart Of Borneo Dan Upaya Penjagaan Kelestarian Hutan Di Kalimantan Barat." *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)* 6.2 (2021): hal 112

⁶ Viotti, Paul R, & Kauppi, Mark V. 1990.

"International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism", Macmillan Publishing Company, a division of Macmillan Inc, new York, Hlm. 215

⁷David Singer, "The Level Of Analysis Problem In International Relations: Dalam World Politic Vol. 4 No. 1, hal. 77-97, 1961

⁸Patrick Morgan. *"Theories and Approaches to International Politics: What are we Thinks"*. New Brunswick: Transaction, 1982

peranan Greenpeace sebagai organisasi internasional yang terlibat dalam kegiatan yang mengatasi kerusakan lingkungan di Indonesia, salah satunya di pulau Kalimantan.

Teori: Peran NGO

Kerangka teoritis adalah kumpulan dari sumber-sumber dan landasan dari sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Teori merupakan sebuah variabel yang memiliki hubungan satu sama lain dengan definisi, dan prosisi yang memunculkan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan menjelaskan hubungan-hubungan di antara variabel yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.⁹

Menurut pendapat Barbara Gemmill-Herren & Abimbola Bamidele Izu, NGO secara umum dapat berperan dalam memperjuangkan sebuah isu atau permasalahan dengan mengambil beberapa bentuk perjuangan, sebagai berikut:

1. *Expert Advice and Analysis* yakni NGO memfasilitasi negosiasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah sehingga memberi akses kepada para politisi untuk mengakomodasi ide-ide atau aspirasi yang berada di luar jalur birokrasi normal.
2. *Intellectual Competition to Governments* yakni NGO memberikan kemampuan analisis dan teknis terbaiknya untuk merespon berbagai permasalahan secara lebih cepat dibandingkan pejabat atau pegawai pemerintahan.

3. *Mobilization of Public Opinion* yakni NGO mempengaruhi masyarakat melalui kampanye ataupun bentuk-bentuk propaganda lainnya.
4. *Representation of the Voiceless* yakni NGO membantu menyuarakan kepentingan orang-orang yang tidak terwakili dengan baik dalam proses pembuatan kebijakan publik.
5. *Service Provision* yakni NGO memberikan keahlian teknisnya atas masalah-masalah tertentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh pihak pemerintah, serta turut berpartisipasi langsung dalam kegiatan operasional.
6. *Monitoring and Assessment* yakni NGO membantu memperkuat perjanjian internasional dengan memantau proses negosiasi dan kepatuhan pemerintah.
7. *Legitimization of Global-Scale Decision Making Mechanisms* yakni NGO memperluas basis informasi untuk pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas, keabsahan dan legitimasi pilihan kebijakan dari organisasi internasional.¹⁰

Dalam klarifikasi yang dijelaskan diatas terlihat bahwasanya Greenpeace sebagai organisasi internasional tentu saja menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pendiriannya yaitu menjamin dan memajukan kerja sama dalam komitmen untuk perlindungan lingkungan hidup.

⁹ Fred N. Kerlinger. 1994. *Asas-Asas Penelitian Behavioral* (Terjemahan Landung R. Simatupang) (Yogyakarta: Gadjah Mada University), Hal. 14.

¹⁰ Herren, Barbara G. & Izu, Abimbola B. (2002). *The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance*. <https://environment.yale.edu/publication-series/documents/downloads/a-g/gemmill.pdf>. (Diakses pada 7 Januari 2023)

Greenpeace bekerja menggabungkan jangkauan global dengan dasar dalam ilmu pengetahuan, melibatkan aksi pada setiap tingkat dari lokal hingga global, serta terlibat dengan sektor swasta dan publik, dan memastikan pengiriman solusi inovatif yang mempengaruhi kebutuhan manusia dan alam. Greenpeace berupaya agar aktifitas-aktifitas yang dijalankan sesuai dengan tujuan utama yang ingin dicapai yaitu perlindungan dan pengelolaan alam di dunia agar tidak terjadi kerusakan oleh masyarakat domestik maupun internasional.

Metodologi Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki karakteristik memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan keadaan dari sebuah fakta. Penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode siklus yakni dimulai dengan memilih proyek penelitian, mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan dengan proyek penelitian, pencarian serta pengumpulan data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian dan terakhir menganalisisnya.

Penulis mengumpulkan data dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yang mana teknik pengumpulan data studi kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan bahan dari berbagai sumber seperti buku, internet, majalah, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan yang dibahas di dalam penelitian ini. Pertimbangan dari data yang digunakan dari sumber-sumber tersebut mencerminkan kontribusi dari Greenpeace dalam mencegah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan.

PEMBAHASAN

Peran Greenpeace terhadap Lingkungan

Selain krisis keuangan yang baru-baru ini melanda Asia, polusi dan eksploitasi sumber daya alam semakin menjadi-jadi. Perusahaan multinasional dan negara-negara industri mengarahkan wilayah ini untuk ekspansi operasi dan teknologi mereka yang merusak lingkungan. Masalah ini semakin diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat Asia terhadap kerusakan lingkungan dan kelemahan mekanisme demokrasi untuk memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mengingat pentingnya potensi pembangunan dan ancaman di wilayah ini, Greenpeace meningkatkan aktivitasnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Indonesia, sebagai negara ketiga di Asia Tenggara setelah Filipina pada tahun 1998 dan Thailand pada tahun 2000, menjadi fokus Greenpeace sejak tahun 2005.¹¹ Mereka berkomitmen pada revolusi energi dan pelestarian hutan di Indonesia. Sebagai organisasi non-pemerintah yang independen secara finansial dan tidak menerima dana dari pemerintah, Greenpeace Indonesia menggalang dana melalui tiga cara: penggalangan dana jalanan, *telefundraising*, dan donasi *online/website*.

Greenpeace memasuki Indonesia pada tahun 2005, memfokuskan kampanyenya pada isu-isu kehutanan, energi, air, dan kelautan. Greenpeace melakukan aksi nyata melalui konfrontasi kreatif, termasuk blokade dengan menggantung spanduk, mengarahkan propaganda ke media massa, sabotase, dan demonstrasi di jalanan. Dalam menghadapi berbagai tantangan, Greenpeace telah mengalami transformasi dalam kampanye dan promosi, menyesuaikan nilai dan isu

¹¹ Greenpeace International Fundraising Principles, <https://www.Greenpeace.org/international/explore/about/values/> diakses pada 10 Maret 2023

lingkungan hidup. Peran Greenpeace di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah menyelidiki, mengungkap, memperjuangkan solusi bersama, dan melakukan advokasi.

Implementasi Program Greenpeace dalam Mencegah Kebakaran Hutan di Pulau Kalimantan

Greenpeace memainkan peran penting dalam menyediakan layanan bantuan, keahlian teknis, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan operasional bersama masyarakat di Kalimantan untuk mencegah kebakaran hutan. Pada tahun 2016, Greenpeace membentuk Tim Cegah Api (TCA) sebagai respons atas krisis kebakaran hutan dan lahan yang memuncak pada 2015, salah satu bencana asap terburuk dalam sejarah Indonesia.¹² TCA terdiri dari para pemuda yang terdampak langsung oleh asap dan ingin berkontribusi dalam mengatasi masalah ini.

Sebagai tim pencegahan, TCA dilatih khusus untuk mendeteksi titik api dan memadamkannya sebelum meluas menjadi kebakaran besar. Mereka menghadapi tantangan khusus di lahan gambut, di mana api sering kali membakar bagian bawah tanah tanpa terlihat di permukaan. Upaya pencegahan termasuk menjaga kelembaban lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Selain pemadaman dini, TCA juga melaksanakan pemantauan kebakaran, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan lahan gambut, serta pemadaman api ketika diperlukan.

TCA bekerja sama dengan ahli pencegahan dan pemadaman dari Rusia, tim Manggala Agni dari KLHK, masyarakat setempat, serta organisasi lingkungan lainnya. Hingga Juli 2022, TCA aktif dalam menghadapi kebakaran yang terjadi di lima provinsi, termasuk Kalimantan Barat, di mana titik api meningkat signifikan. Kolaborasi ini membantu mempercepat upaya pemadaman kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat setempat.¹³

Peran Greenpeace Sebagai Saingan Intelektual Terhadap Pemerintah dan Mobilisasi Opini Publik

Greenpeace sebagai organisasi non-pemerintah memiliki keunggulan dalam keahlian teknis dan kemampuan analitis yang memungkinkannya merespons isu-isu lingkungan lebih cepat dibandingkan pejabat pemerintah. Dalam konteks kebakaran hutan di Kalimantan, Greenpeace tidak hanya memberikan dukungan teknis, tetapi juga terlibat langsung dalam upaya di lapangan. Selain itu, Greenpeace melakukan penelitian ilmiah untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong tindakan berkelanjutan guna melindungi lingkungan.

Sebagai bagian dari upaya menangani kebakaran hutan di Kalimantan, Greenpeace telah melakukan penelitian mendalam dan menerbitkan hasilnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak kebakaran hutan terhadap lingkungan dan sosial. Salah satu penelitian mereka, berjudul *Indonesia: Deforestasi Meningkat di Area-Area yang Dilindungi oleh Moratorium*, mengungkapkan bahwa

¹² Greenpeace, "Mencegah dan Memadamkan Demi Hutan Tanpa Api" <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/1453/mencegah-dan-memadamkan-demi-hutan-tanpa-api/> diakses pada 2 Mei 2024

¹³ Greenpeace, "Kembalinya Tim Cegah Api untuk Hutan Indonesia" <https://www.greenpeace.org/indonesia/aksi/hutan-tanpa-api/> diakses pada 5 Mei 2024

moratorium yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan dan lahan gambut tidak berjalan sesuai harapan. Walaupun dirancang untuk mencegah deforestasi dan konversi lahan, moratorium ini belum efektif, bahkan deforestasi justru meningkat di area yang seharusnya dilindungi.¹⁴

Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari total area yang terbakar antara 2015 dan 2018 berada di wilayah moratorium. Dari total area moratorium seluas 65,9 juta hektar, hanya sekitar 14,6 juta hektar yang benar-benar mendapat perlindungan. Selain itu, tingkat deforestasi di area moratorium mencapai 1,2 juta hektar dari 2012 hingga 2018, meningkat dibandingkan periode sebelum moratorium. Revisi reguler terhadap peta moratorium oleh pemerintah setiap enam bulan sering kali mengurangi luas area hutan dan lahan gambut yang dilindungi, sehingga menghambat efektivitas moratorium.¹⁵

Greenpeace merekomendasikan perluasan cakupan moratorium, pemanfaatan inisiatif Satu Peta untuk meningkatkan kualitas pemetaan hutan dan gambut, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengawasan moratorium. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan angka deforestasi dan kebakaran, demi mencapai target nol deforestasi, nol

kebakaran hutan, dan nol pengeringan lahan gambut baru.

Selain itu, Greenpeace menerbitkan *Briefer – Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perusahaan Kelapa Sawit dan Bubur Kertas dengan Area Kebakaran Terbesar Tak Tersentuh Hukum*, yang menyoroti kelemahan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam kebakaran hutan. Temuan mereka menunjukkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang dikenai sanksi, meskipun area konsesi mereka terus mengalami kebakaran setiap tahun. Beberapa grup besar, seperti Sinar Mas/APP di sektor bubur kertas, hanya dikenai sanksi minimal meskipun konsesinya termasuk yang terbakar paling luas. Situasi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang memungkinkan perusahaan beroperasi tanpa takut akan konsekuensi, menekankan pentingnya reformasi dalam penegakan hukum untuk kasus kebakaran hutan.

Greenpeace aktif dalam menggalang kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai polusi udara dan dampak kebakaran hutan. Salah satu kampanye penting dilakukan pada 21 Agustus 2018, ketika mereka memasang poster raksasa bertuliskan #WeBreatheTheSameAir di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Jakarta. Poster ini menampilkan data kualitas udara yang diukur oleh BMKG dan perangkat pemantau milik Greenpeace di berbagai lokasi strategis. Melalui kampanye ini, Greenpeace berusaha menyoroti seriusnya masalah polusi udara dan mengajak masyarakat serta pemerintah untuk mengambil langkah lebih konkret dalam mengatasinya.¹⁶

¹⁴ Ibid

¹⁵ Greenpeace Indonesia, “*Briefer – Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perusahaan Kelapa Sawit dan Bubur Kertas dengan Area Kebakaran Terbesar Tak Tersentuh Hukum*” <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3795/briefer-krisis-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-perusahaan-kelapa-sawit-dan-bubur-kertas-dengan-area-kebakaran-terbesar-tak-tersentuh-hukum/> diakses pada 25 Mei 2024

¹⁶ Greenpeace “*Polusi Jakarta Masih Terus Diabaikan, Ini Saran Greenpeace*”

Kampanye Greenpeace tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga mencakup Kalimantan yang sering terdampak kebakaran hutan dan polusi udara. Greenpeace melakukan analisis mendalam mengenai dampak kebakaran hutan terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat di Kalimantan, menyebarkan hasil temuan ini melalui media sosial dan kampanye publik. Tujuan utama dari kampanye ini adalah menekan pemerintah dan pihak terkait untuk lebih proaktif dalam mencegah kebakaran hutan dan mengurangi polusi udara.

Greenpeace juga memanfaatkan platform media sosial, seperti Instagram, untuk memperluas jangkauan kampanye mereka dan menarik perhatian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan. Melalui akun Instagram resmi mereka, Greenpeace secara konsisten menyebarkan konten edukatif yang mencakup foto, video, dan cerita kampanye, yang menggambarkan kegiatan lapangan, aksi damai, serta inisiatif perlindungan lingkungan. Melalui Instagram, Greenpeace berhasil menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang aktif di media sosial.

Melalui konten visual dan cerita interaktif, Greenpeace dapat membangun komunitas online yang peduli terhadap isu-isu lingkungan dan mendorong dukungan publik terhadap kampanye mereka. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesadaran publik yang lebih besar, menginspirasi perubahan perilaku, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan di Kalimantan.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1050/polusi-jakarta-masih-terus-diabaikan-ini-saran-greenpeace/> diakses pada 6 Mei 2024

Melalui kampanye di media sosial, Greenpeace berupaya membangun dukungan yang lebih luas terhadap inisiatif mereka, termasuk mendorong tindakan nyata dari masyarakat untuk melawan perubahan iklim, melindungi hutan dan lautan, serta menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia.

Peran Greenpeace dalam Menjadi Perwakilan Bagi yang Tidak Berdaya

Organisasi non-pemerintah (NGO) seperti Greenpeace memiliki peran penting sebagai penasihat ahli yang dapat memfasilitasi komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah. Dengan peran ini, mereka dapat menyampaikan ide-ide di luar jalur birokrasi formal kepada pembuat kebijakan. Selain itu, Greenpeace juga mewakili kelompok yang tidak memiliki suara (*representation of the voiceless*) dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang rentan dan sering kali terpinggirkan.

Sebagai contoh, Greenpeace Indonesia bersama koalisi masyarakat sipil, termasuk berbagai LSM lingkungan dan HAM, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo. Surat ini berisi tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) yang dinilai ditangani dengan lambat oleh pemerintah. Mereka mendesak langkah tanggap darurat yang mencakup penyediaan tenaga medis hingga evakuasi warga terdampak. Selain itu, surat ini juga disebarkan kepada lembaga-lembaga lain yang dinilai memiliki tanggung jawab dalam menangani kebakaran hutan, menekankan peran Greenpeace sebagai penasihat ahli dan representasi bagi masyarakat yang terdampak.¹⁷

¹⁷ KumparanNews, “Koalisi Masyarakat Sipil Surati Jokowi Agar Selesaikan Kebakaran Hutan “ <https://kumparan.com/kumparannews/koalisi->

Di Kalimantan, Greenpeace mengimplementasikan perannya sebagai penasihat dan wakil suara yang tak terdengar melalui program Tim Cegah Api. Program ini melibatkan deteksi dan pemadaman kebakaran serta kerja sama dengan masyarakat setempat, kepolisian, dan BPBD. Melalui program ini, Greenpeace memastikan suara masyarakat terdampak di Kalimantan didengar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.

Kesimpulan

Sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) yang terlibat langsung di lapangan, Greenpeace menunjukkan komitmen yang kuat melalui pendekatan service provision, di mana mereka tidak hanya menyediakan bantuan teknis tetapi juga secara aktif terlibat dalam operasi pencegahan kebakaran. Contoh nyata dari peran ini adalah pembentukan Tim Cegah Api, yang berkolaborasi dengan kelompok-kelompok lokal untuk mengatasi kebakaran hutan secara langsung, menandai pendekatan praktis dan berbasis komunitas yang menjadi ciri khas Greenpeace.

Selain itu, Greenpeace memainkan peran yang signifikan sebagai pesaing intelektual terhadap pemerintah, di mana mereka sering kali mampu merespons isu-isu lingkungan. Dalam konteks kebakaran hutan di Kalimantan, Greenpeace memobilisasi opini publik melalui berbagai bentuk kampanye dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan. Penerbitan jurnal penelitian menjadi salah satu alat utama mereka untuk

mengedukasi publik dan memberikan bukti ilmiah mengenai kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan, sekaligus menunjukkan bagaimana konsumsi masyarakat berkontribusi terhadap masalah ini. Kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace tidak hanya bertujuan untuk menginformasikan tetapi juga untuk mendorong tindakan yang lebih berkelanjutan dari masyarakat luas.

Penutup kesimpulan ini menyoroti peran Greenpeace sebagai penasihat ahli, di mana mereka berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat sipil dan pemerintah. Dengan kemampuan analisis dan teknis yang mendalam, Greenpeace memberikan saran yang berbasis bukti dan berusaha mempengaruhi kebijakan lingkungan di luar jalur birokrasi formal. Salah satu contoh konkrit dari peran ini adalah pengiriman surat terbuka oleh Greenpeace Indonesia bersama koalisi masyarakat sipil kepada Presiden RI, yang berisi tuntutan untuk penanganan yang lebih serius terhadap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Melalui tindakan ini, Greenpeace menegaskan posisinya sebagai aktor dalam advokasi lingkungan yang tidak hanya beroperasi di lapangan tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik.

Secara keseluruhan, upaya Greenpeace di Kalimantan menunjukkan pendekatan yang dinamis, di mana mereka menggabungkan tindakan langsung, mobilisasi opini publik, dan advokasi kebijakan untuk menciptakan perlindungan lingkungan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Peran mereka dalam mencegah kebakaran hutan tidak hanya mencerminkan dedikasi mereka terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga

masyarakat-sipil-surati-jokowi-agar-selesaikan-kebakaran-hutan-1rsG0FTA5f/full diakses pada 27 Mei 2024

kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/> (diakses pada 10 Novemeber 2022)
- Bella Putri, “Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia”, (JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni, 2019), Hal. 9.
- David Singer, “ The Level Of Analysis Problem In International Relations: Dalam World Politic Vol. 4 No. 1, hal. 77-97, 1961
- Fred N. Kerlinger. 1994. Asas-Asas Penelitian Behavioral (Terjemahan Landung R. Simatupang) (Yogyakarta: Gadjah Mada University), Hal. 14.
- Greenpeace “Polusi Jakarta Masih Terus Diabaikan, Ini Saran Greenpeace” <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1050/polusi-jakarta-masih-terus-diabaikan-ini-saran-greenpeace/> diakses pada 6 Mei 2024
- Greenpeace Indonesia, “Briefer – Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perusahaan Kelapa Sawit Greenpeace Indonesia, *“Briefer – Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perusahaan Kelapa Sawit dan Bubur Kertas dengan Area*
- Patrick Morgan. “Theories and Approaches to International Politics: What are we Thinks”. New Brunswick: Transaction, 1982
- Suni, Bakran, and Haunan Fachry Rohilie. "Evaluasi Kebijakan PengelolaanHeart Of Borneo Dan Upaya Penjagaan Kelestarian Hutan Di Kalimantan Barat." JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Kebakaran Terbesar Tak Tersentuh Hukum” <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3795/briefer-krisis-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-perusahaan-kelapa-sawit-dan-bubur-kertas-dengan-area-kebakaran-terbesar-tak-tersentuh-hukum/> diakses pada 25 Mei 2024
- Greenpeace International, “Our Offices”.<https://www.greenpeace.org/international/explore/about/worldwide/> (Diakses pada 26 Agustus 2022)
- Greenpeace, “Kembalinya Tim Cegah Api untuk Hutan Indonesia” <https://www.greenpeace.org/indonesia/aksi/hutan-tanpa-api/> diakses pada 5 Mei 2024
- Herren, Barbara G. & Izu, Abimbola B. (2002). The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance. <https://environment.yale.edu/publication-series/documents/downloads/a-g/gemmill.pdf>. (Diakes pada 7 Januari 2023)
- KumparanNews, “Koalisi Masyarakat Sipil Surati Jokowi Agar Selesaikan Kebakaran Hutan “ <https://kumparan.com/kumparannews/koalisi-masyarakat-sipil-surati-jokowi-agar-selesaikan-kebakaran-hutan-1rsG0FTAh5f/full> diakses pada 27 Mei 2024
- Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) 6.2 (2021): hal 112
- Viotti, Paul R, & Kauppi, Mark V. 1990. “International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism”, Macmillan Publshingn Company, a division of Macmillan Inc, new York, Hlm. 215

Wirendro Sumargo, “Potret Keadaan Hutan
Indonesia Periode 2000 – 2009”,
(Forest Watch Indonesia, 2011).
Hal. 1.